

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PT JAMSOSTEK (Persero) TERHADAP PELAKSANAAN JAMSOSTEK DI SURABAYA



MUH. FAJARUDDIN S.

030015127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



**TANGGUNG JAWAB PT JAMSOSTEK (Persero)
TERHADAP PELAKSANAAN JAMSOSTEK
DI SURABAYA**

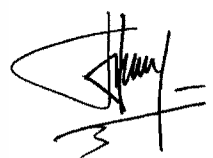
SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,


Wuri Andrijani, S.H., M.Hum.
131 653 462

Penyusun,


Muh. Fajaruddin S.
030015127

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberadaan Jamsostek sebagai salah satu bentuk Asuransi Sosial masih dibutuhkan oleh pekerja, karena dengan jaminan sosial tersebut dapat melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja beserta anggota keluarga dari resiko yang tidak diinginkan dan menurut pengaturan Hukum Asuransi di Indonesia tidak semua perjanjian asuransi atau pertanggungan ditutup dengan adanya suatu akta tertulis atau Polis. Khusus Jamsostek tidak perlu setiap pekerja mendapatkan Polis melainkan terbagi dalam beberapa kelompok besar dan bisa dibuktikan dengan formulir Jamsostek la yang berisi pendaftaran pekerja untuk menjadi peserta Jamsostek. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 258 KUHD. Dan Jamsostek sendiri masuk dalam kategori Asuransi Campuran karena merupakan gabungan antara Asuransi Kerugian maupun Asuransi Jiwa yang dibuktikan dengan adanya jaminan sosial dan santunan kematian yang dibayarkan kepada pihak Tertanggung (pekerja) jika terjadi peristiwa tidak pasti.
- b. Jika pekerja mengalami kerugian terhadap peristiwa tidak pasti maka pekerja tersebut berhak memperoleh pembayaran ganti rugi (klaim) dari Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Sedangkan upaya hukum yang bisa dilakukan pekerja selaku pihak Tertanggung yang berkepentingan terhadap penyimpangan pelaksanaan Jamsostek adalah membawa kasus tersebut ke Pengadilan setempat dengan dalil perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ataupun melalui sistem alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang lebih hemat.

2. Saran

- a. Bahwa dengan telah dikeluarkannya berbagai peraturan baik peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah atau Departemen Tenaga Kerja dan adanya berbagai kebijaksanaan dari Badan Penyelenggara Jamsostek, maka semua peraturan itu harus diikuti dengan implementasi yang benar-benar terarah dan tegas.
- b. Implementasi secara tegas berarti pemenuhan ganti rugi (klaim) yang berkaitan dengan Jaminan Sosial yang diberikan dalam hal kecelakaan kerja hendaklah diselaraskan dengan kepastian hukum sehingga hal tersebut akan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Jamsostek. Hal ini bisa dilakukan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan diperberat lagi jika masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Jadi meski sekecil apapun penyimpangan tersebut harus dikenakan sanksi hukum.